

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Selama Triwulan II Tahun 2026, perkembangan harga komoditas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menunjukkan kecenderungan fluktuatif, terutama pada kelompok volatile food seperti cabai, bawang merah, dan tomat. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor musiman, pasokan hasil panen, biaya distribusi, serta meningkatnya permintaan masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Secara regional, inflasi di Provinsi Sulawesi Utara pada Juni 2026 meningkat cukup tinggi, terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau akibat kenaikan harga komoditas pangan strategis.

Perkembangan Harga Komoditas

Komoditas	April 2026	Mei 2026	Juni 2026	Keterangan
Cabai Rawit Merah	± Rp75.000/kg	± Rp60.000/kg	± Rp55.000/kg	Mulai turun seiring panen lokal
Cabai Merah	± Rp65.000/kg	± Rp55.000/kg	± Rp50.000/kg	Pasokan meningkat
Bawang Merah	± Rp60.000/kg	± Rp50.000/kg	± Rp45.000/kg	Distribusi kembali normal
Bawang Putih	Rp40.000/kg	Rp40.000/kg	Rp40.000/kg	Relatif stabil
Beras Premium	Rp14.500/kg	Rp14.500/kg	Rp14.500/kg	Stabil
Minyakita	Rp15.700/liter	Rp15.700/liter	Rp15.700/liter	Stabil
Gula Pasir	Rp18.000/kg	Rp18.000/kg	Rp18.000/kg	Stabil
Daging Sapi	Rp130.000/kg	Rp130.000/kg	Rp130.000/kg	Stabil
Telur Ayam Ras	Rp32.000/kg	Rp31.000/kg	Rp31.000/kg	Sedikit turun
Tomat	Rp10.000/kg	Rp8.000/kg	Rp7.000/kg	Produksi meningkat

Angka merupakan hasil pemantauan harga pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan dapat disesuaikan dengan data resmi TPID.

1. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Penyumbang Inflasi (APRIL 2026)

- Terjadi kenaikan harga cabai rawit dan bawang merah sebagai dampak tingginya permintaan pasca Idulfitri.
- Distribusi dari sentra produksi belum sepenuhnya normal sehingga pasokan masih terbatas.
- Komoditas beras, minyak goreng, gula, dan bawang putih relatif stabil.

1. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Penyumbang Inflasi (Mei 2026)

- Harga cabai mulai mengalami penurunan karena memasuki masa panen di beberapa sentra produksi.
- Berdasarkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH), kabupaten/kota di Sulawesi Utara secara umum mengalami penurunan tekanan harga pada Mei 2026.
- Stabilitas pasokan pangan semakin membaik sehingga inflasi pangan mulai terkendali.

Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Penyumbang Inflasi (Juni 2026)

1.

- Sebagian besar komoditas hortikultura kembali mengalami penurunan harga.
- Tekanan inflasi regional Sulawesi Utara masih berasal dari kelompok volatile food, meskipun kondisi di Bolssel relatif lebih terkendali dibanding puncak kenaikan pada April.

Faktor yang Mempengaruhi Pergerakan Harga

1. Produksi hortikultura yang bergantung pada musim panen.
2. Kelancaran distribusi dari daerah sentra produksi menuju Bolssel.
3. Permintaan masyarakat selama dan setelah HBKN.
4. Kondisi cuaca yang memengaruhi hasil panen.
5. Biaya transportasi dan logistik.

Upaya TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

- Melaksanakan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin.
- Berkoordinasi dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha untuk menjaga pasokan pangan.
- Melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan.
- Memperkuat koordinasi melalui rapat TPID bersama Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, dan instansi terkait.
- Melakukan pelaporan perkembangan harga secara berkala kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.

Kesimpulan

Pada Triwulan II Tahun 2026, kondisi harga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan cenderung terkendali meskipun sempat mengalami tekanan pada April 2026 akibat tingginya permintaan dan keterbatasan pasokan beberapa komoditas hortikultura. Memasuki Mei hingga Juni, pasokan mulai membaik sehingga harga cabai, bawang merah, dan tomat mengalami penurunan. Upaya koordinasi TPID serta pemantauan pasar secara intensif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.

1. Kelompok Komoditas Cabai Rawit

Pada Triwulan II Tahun 2026, harga cabai rawit mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Pada April 2026, harga meningkat hingga sekitar Rp75.000/kg akibat tingginya permintaan masyarakat setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, disertai terbatasnya pasokan dari sentra produksi karena faktor cuaca dan distribusi. Memasuki Mei hingga Juni 2026, harga cabai rawit mulai menurun menjadi sekitar Rp60.000/kg pada Mei dan Rp55.000/kg pada Juni. Penurunan ini dipengaruhi oleh mulai berlangsungnya masa panen di beberapa daerah penghasil serta membaiknya distribusi sehingga pasokan di pasar kembali mencukupi.

2. Komoditas Tomat

Harga tomat selama Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan tren menurun. Pada April 2026 harga masih berada di kisaran Rp10.000/kg, kemudian turun menjadi sekitar Rp8.000/kg pada Mei dan Rp7.000/kg pada Juni. Penurunan harga terjadi karena meningkatnya produksi lokal dan melimpahnya pasokan dari daerah sentra produksi. Kondisi tersebut menyebabkan ketersediaan tomat di pasar relatif mencukupi sehingga tekanan harga berkurang.

3. Komoditas Beras

Harga beras di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama Triwulan II Tahun 2026 relatif stabil. Beras premium tetap berada pada kisaran Rp14.500/kg tanpa mengalami perubahan yang signifikan dari April hingga Juni 2026. Stabilitas harga didukung oleh ketersediaan stok yang cukup, kelancaran distribusi, serta adanya dukungan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh Bulog sehingga pasokan di tingkat pasar tetap terjaga dan mampu menahan gejolak harga.

4. Kelompok Komoditas Bawang Merah

Harga bawang merah mengalami penurunan secara bertahap selama Triwulan II Tahun 2026. Pada April 2026 harga berada pada kisaran Rp60.000/kg akibat terbatasnya pasokan pasca-HBKN. Memasuki Mei harga turun menjadi sekitar Rp50.000/kg, kemudian kembali menurun menjadi sekitar Rp45.000/kg pada Juni 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi dari sentra-sentra pertanian serta normalnya distribusi antardaerah, sehingga pasokan di pasar menjadi lebih stabil dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Bulan April 2026

Pada bulan April 2026, tekanan inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meningkat akibat tingginya permintaan masyarakat menjelang dan sesudah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Kenaikan permintaan terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Terjadi kenaikan harga cabai rawit akibat pasokan dari sentra produksi berkurang karena curah hujan tinggi serta meningkatnya permintaan masyarakat.
- Bawang merah mengalami kenaikan harga karena pasokan dari luar daerah belum stabil dan biaya distribusi meningkat.
- Harga tomat cenderung berfluktuasi karena produksi lokal menurun akibat faktor cuaca.
- Distribusi komoditas pangan mengalami keterlambatan akibat kondisi cuaca yang mengganggu transportasi laut menuju Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah menyebabkan harga mudah mengalami kenaikan ketika terjadi gangguan distribusi.
- Meningkatnya konsumsi masyarakat selama HBKN menyebabkan permintaan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan pasokan.

Bulan Mei 2026

Pada bulan Mei 2026 kondisi inflasi mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya, meskipun beberapa komoditas strategis masih mengalami fluktuasi harga.

Permasalahan yang dihadapi meliputi:

- Harga cabai rawit masih relatif tinggi karena produksi petani belum kembali normal setelah musim hujan.
- Pasokan beras masih bergantung pada daerah pemasok sehingga rentan terhadap perubahan harga di tingkat distributor.
- Produksi hortikultura lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
- Biaya transportasi logistik masih cukup tinggi sehingga memengaruhi harga jual komoditas di pasar.
- Belum optimalnya sistem informasi harga dan distribusi menyebabkan penyesuaian pasokan belum berjalan secara cepat.
- Kegiatan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan secara merata.

3. Bulan Juni 2026

Pada bulan Juni 2026 tekanan inflasi relatif lebih terkendali dibandingkan dua bulan sebelumnya. Namun masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Harga komoditas hortikultura seperti cabai rawit dan tomat masih berfluktuasi mengikuti musim panen.
- Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih cukup tinggi sehingga risiko inflasi tetap besar apabila terjadi gangguan distribusi.
- Ketersediaan stok pangan strategis perlu terus dijaga untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pada periode berikutnya.
- Infrastruktur distribusi dan rantai pasok belum sepenuhnya efisien sehingga biaya logistik masih relatif tinggi.
- Koordinasi antarinstansi dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat melalui pemantauan harga secara rutin, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, dan kerja sama antar daerah.
- Produktivitas pertanian lokal masih perlu ditingkatkan agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Upaya Pengendalian Inflasi

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Pemerintah Daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya dengan mengacu pada strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

2.

Bulan April 2026

1.

Pada bulan April 2026, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi difokuskan pada pengendalian harga pangan menjelang dan setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Melaksanakan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin di pasar tradisional dan distributor.
- Menggelar rapat koordinasi TPID bersama perangkat daerah, Bulog, BPS, serta instansi terkait untuk mengantisipasi lonjakan harga.
- Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
- Berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok beras program SPHP dan komoditas strategis lainnya.
- Melakukan pengawasan distribusi komoditas pangan guna menghindari kelangkaan maupun praktik penimbunan.
- Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara rutin.

2. Bulan Mei 2026

Pada bulan Mei 2026, kebijakan diarahkan pada stabilisasi harga pasca-HBKN serta menjaga kesinambungan pasokan pangan.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Melanjutkan pemantauan harga harian terhadap komoditas penyumbang inflasi, terutama cabai rawit, bawang merah, tomat, dan beras.
- Melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah di beberapa kecamatan sebagai bentuk intervensi pasar.
- Meningkatkan koordinasi dengan daerah pemasok untuk menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan.
- Mendorong pemanfaatan produksi pertanian lokal melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian dan kelompok tani.
- Melakukan evaluasi perkembangan inflasi daerah bersama BPS dan Bank Indonesia sebagai dasar penyusunan langkah pengendalian berikutnya.
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai belanja bijak dan diversifikasi konsumsi pangan.

3. Bulan Juni 2026

Pada bulan Juni 2026, pelaksanaan kebijakan difokuskan pada upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Melakukan pemantauan rutin harga dan stok bahan pokok di pasar tradisional maupun distributor.
- Melaksanakan koordinasi lintas sektor melalui TPID dalam rangka mengantisipasi

potensi kenaikan harga pada semester berikutnya.

- Mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pada wilayah yang mengalami kenaikan harga komoditas tertentu.
- Mendorong peningkatan produksi komoditas hortikultura lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
- Memperkuat kerja sama antardaerah (KAD) sebagai upaya menjaga keberlanjutan pasokan pangan strategis.
- Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi Triwulan II sebagai dasar penyusunan kebijakan pada Triwulan III Tahun 2026.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi selama Triwulan II Tahun 2026 memberikan beberapa hasil sebagai berikut:

- Ketersediaan bahan pokok strategis tetap terjaga meskipun terjadi peningkatan permintaan pada periode HBKN.
- Lonjakan harga komoditas pangan, khususnya cabai rawit dan bawang merah, dapat dikendalikan melalui intervensi pasar dan koordinasi distribusi.
- Gerakan Pangan Murah membantu menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
- Sinergi TPID dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bulog, Bank Indonesia, BPS, dan perangkat daerah semakin efektif dalam pengendalian inflasi.
- Pemantauan harga secara berkala memungkinkan pemerintah daerah mengambil langkah cepat terhadap potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Triwulan II Tahun 2026 berjalan cukup efektif melalui penerapan strategi 4K, penguatan koordinasi lintas sektor, serta berbagai intervensi stabilisasi harga dan pasokan pangan sehingga mampu menjaga inflasi daerah tetap terkendali.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa berbagai langkah yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di daerah.

1. Evaluasi Bulan April 2026

Pada bulan April 2026, tekanan inflasi meningkat akibat tingginya permintaan masyarakat selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. TPID melaksanakan pemantauan

harga, Gerakan Pangan Murah (GPM), koordinasi dengan Bulog, serta pengawasan distribusi pangan.

Hasil evaluasi:

- Pemantauan harga berjalan secara rutin sehingga perkembangan harga komoditas strategis dapat dipantau dengan baik.
- Gerakan Pangan Murah membantu menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, terutama untuk beras, gula, dan minyak goreng.
- Koordinasi dengan Bulog mampu menjaga ketersediaan stok beras dan bahan pangan strategis.
- Harga cabai rawit dan bawang merah masih mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan dari sentra produksi serta meningkatnya permintaan masyarakat.
- Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas harga.

Catatan evaluasi:

Perlu peningkatan kerja sama antardaerah dalam penyediaan pasokan pangan serta penguatan produksi hortikultura lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap daerah pemasok.

2. Evaluasi Bulan Mei 2026

Pada bulan Mei 2026, kondisi harga mulai berangsur stabil seiring berakhirnya periode HBKN, meskipun beberapa komoditas hortikultura masih mengalami fluktuasi.

Hasil evaluasi:

- Harga sebagian besar bahan pokok mulai menunjukkan tren stabil.
- Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat.
- Koordinasi TPID dengan pemerintah provinsi, Bulog, Bank Indonesia, dan BPS berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi dan pemantauan rutin.
- Distribusi pangan berjalan lebih lancar dibandingkan bulan sebelumnya.
- Produksi komoditas lokal belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara optimal sehingga pasokan luar daerah masih mendominasi.

Catatan evaluasi:

Pemerintah daerah perlu memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di seluruh kecamatan serta meningkatkan dukungan terhadap petani melalui penyediaan sarana produksi dan pendampingan budidaya.

3. Evaluasi Bulan Juni 2026

Pada bulan Juni 2026, inflasi relatif lebih terkendali dan harga sebagian besar komoditas

strategis berada pada kondisi yang stabil.

Hasil evaluasi:

- Pemantauan harga dan stok pangan berlangsung secara konsisten.
- Koordinasi lintas sektor melalui TPID semakin efektif dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga.
- Ketersediaan stok pangan pokok tetap terjaga sehingga tidak terjadi kelangkaan komoditas strategis.
- Fluktuasi harga cabai rawit dan tomat masih dipengaruhi oleh faktor musim dan hasil panen.
- Pelaksanaan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek produksi dan distribusi pangan lokal.

Catatan evaluasi:

Perlu penguatan sistem informasi harga secara real time, peningkatan kerja sama antardaerah, pengembangan cadangan pangan daerah, serta peningkatan produktivitas komoditas hortikultura melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk memperkuat efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diperlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat responsif terhadap gejolak harga, tetapi juga mampu membangun ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan berikut disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi Triwulan II Tahun 2026.

1. Penguatan Produksi Pangan Lokal

Pemerintah daerah perlu meningkatkan produksi komoditas penyumbang inflasi, terutama cabai rawit, bawang merah, tomat, dan beras melalui:

1. Perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan pertanian.
2. Penyediaan benih unggul, pupuk, dan sarana produksi pertanian.
3. Pendampingan petani melalui penyuluh pertanian.
4. Pengembangan kawasan hortikultura sebagai sentra produksi pangan daerah.

Output yang diharapkan: meningkatnya produksi lokal sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.

2. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Meningkatkan kerja sama dengan daerah sentra produksi pangan di Sulawesi Utara maupun provinsi lain melalui:

1. Perjanjian kerja sama penyediaan komoditas strategis.
2. Penguatan jaringan distribusi pangan.
3. Penyusunan mekanisme distribusi pada saat terjadi gangguan pasokan.

Output yang diharapkan: pasokan pangan lebih terjamin dan risiko kelangkaan komoditas dapat diminimalkan.

3. Optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar

Pelaksanaan GPM dan operasi pasar perlu dilakukan secara lebih terencana dengan mempertimbangkan pola musiman dan kalender Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Langkah yang dapat dilakukan:

1. Menambah frekuensi pelaksanaan GPM.
2. Memperluas lokasi pelaksanaan hingga seluruh kecamatan.
3. Memprioritaskan komoditas penyumbang inflasi.

Output yang diharapkan: keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat tetap terjaga.

4. Penguatan Sistem Pemantauan Harga Berbasis Digital

Mengembangkan sistem informasi harga pangan yang terintegrasi antar perangkat daerah sehingga data harga dapat dipantau secara cepat dan akurat.

Kebijakan meliputi:

- Digitalisasi pelaporan harga pasar.
- Dashboard pemantauan harga harian.
- Sistem peringatan dini (early warning system) terhadap kenaikan harga.

Output yang diharapkan: pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data.

5. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Meningkatkan kapasitas cadangan pangan pemerintah sebagai instrumen stabilisasi harga ketika terjadi gangguan pasokan.

Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Menambah stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
2. Memperkuat koordinasi dengan Bulog.
3. Menyusun mekanisme penyaluran cadangan pangan secara cepat ketika terjadi gejolak harga.

Output yang diharapkan: stabilitas pasokan dan harga pangan lebih terjamin.

6. Efisiensi Distribusi dan Logistik Pangan

Mengurangi hambatan distribusi pangan melalui:

- Perbaikan koordinasi distribusi antarpelaku usaha.
- Optimalisasi sarana transportasi menuju wilayah kecamatan.
- Penguatan jaringan distribusi dari daerah pemasok.

Output yang diharapkan: biaya distribusi lebih rendah sehingga harga pangan lebih stabil.

Penguatan Koordinasi TPID

Meningkatkan peran TPID melalui:

1. Rapat koordinasi rutin dan evaluasi bulanan.
2. Penyusunan peta risiko inflasi daerah.
3. Penguatan sinergi dengan Bank Indonesia, BPS, Bulog, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait.

Output yang diharapkan: kebijakan pengendalian inflasi lebih terkoordinasi dan responsif.

8. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik

Melaksanakan komunikasi publik secara berkelanjutan mengenai:

1. Informasi perkembangan harga pangan.
2. Pola konsumsi yang bijak dan diversifikasi pangan lokal.
3. Edukasi kepada masyarakat untuk menghindari panic buying.

Output yang diharapkan: ekspektasi inflasi masyarakat tetap terjaga dan perilaku konsumsi menjadi lebih rasional.

Prioritas Rekomendasi Kebijakan

Prioritas	Rekomendasi	Jangka Waktu
Tinggi	Peningkatan produksi pangan lokal	Jangka menengah-panjang
Tinggi	Penguatan kerja sama antardaerah (KAD)	Jangka pendek-menengah
Tinggi	Optimalisasi Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar	Jangka pendek
Tinggi	Penguatan sistem pemantauan harga berbasis digital	Jangka pendek
Menengah	Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah	Jangka menengah
Menengah	Efisiensi distribusi dan logistik pangan	Jangka menengah
Menengah	Penguatan koordinasi TPID	Berkelanjutan
Menengah	Edukasi dan komunikasi publik	Berkelanjutan

Kesimpulan

Ke depan, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu diarahkan pada penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan produksi komoditas strategis, perbaikan sistem distribusi, digitalisasi pemantauan harga, serta penguatan koordinasi lintas sektor melalui TPID. Pendekatan ini tidak hanya akan meredam gejolak harga dalam jangka pendek, tetapi juga membangun sistem pengendalian inflasi yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan untuk mendukung stabilitas ekonomi daerah serta menjaga daya beli Masyarakat.